

Nahdlatul Ulama Dan Pilkada Gubernur Jawa Timur

Inggriht Fatamorgana*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan yang berada dibalik keterlibatan Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo dalam mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono dalam pilgub Jawa Timur. Selain kepentingan, strategi yang mereka gunakan untuk menyakinkan konstituen mereka agar mencontreng pasangan Khofifah-Mudjiono juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terungkap bahwa ukhuwah islamiyah sebagai penyangga utama NU menjadi faktor utama yang mendorong Muslimat, Fatayat dan IPPNU untuk terjun langsung mendukung Khofifah-Mudjiono hingga ke desa-desa. Sedangkan untuk strategi pemenangan pasangan Khofifah-Mudjiono, banom perempuan NU mendapat bantuan dari pemuka agama dalam menentukan preferensi politik warga nadliyin di Sidoarjo, selain bantuan dari pemuka agama pendekatan rasional dan emosional juga digunakan untuk mendongkrak suara Kaji Manteb di Sidoarjo.

Kata-Kata Kunci: Kepentingan, Strategi Pemenangan Pemilu, Organisasi Masyarakat Perempuan.

Pendahuluan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013, diikuti oleh lima pasangan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur yakni: 1). Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (Ka-Ji) yang didukung oleh PPP, 2). Sutjipto-Ridwan Hisjam (SR) yang didukung oleh PDIP, 3). Soernarjo-Ali Machsan Moesa (Salam) yang didukung oleh Golkar, 4). Achmady-Suhartono (Achsan) yang didukung oleh PKB, dan yang terakhir 5). Soekarwo-Saifullah Yusuf (Kar-Sa) didukung oleh Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional.

Kesepuluh peserta pilgub diatas baik yang mencalonkan diri sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur, kita dapat melihat beberapa kader Nahdlatul Ulama ikut meramaikan bursa pilgub tahun ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia selalu menjadi 'bunga desa' dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, baik itu dalam pemilihan kepala Negara, pemilihan kepala daerah provinsi maupun pemilihan kepala daerah kabupaten, banyak kader NU yang diperebutkan sebagai calon-calon pemimpin ataupun mencalonkan diri sebagai pemimpin.

Besarnya suara NU membuat para elit NU tidak tinggal diam, seperti K.H. Ali Maschan Moesa yang menyatakan dirinya sebagai calon

wakil gubernur berpasangan dengan Soenarjo dengan menggunakan kendaraan partai Golkar. Bagi Soenarjo ide untuk menggandeng K.H. Ali Maschan Moesa yang notabene adalah Ketua PWNU diharapkan bisa menarik suara nadliyin yang masih sangat paternalistik dengan memandang Kyai sebagai panutan.

Saifullah Yusuf atau yang lebih akrab dipanggil Gus Ipul adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor yang juga mantan Menteri Daerah Tertinggal, bersedia menjadi calon wakil gubernur berpasangan dengan pak Soekarwo yang diusung oleh Partai Amanat Nasional. Sedangkan untuk kader NU yang mencalonkan sebagai gubernur pertama adalah Bupati Mojokerto Achmady. Meski berangkat dari PKB yang notabene partai NU, namun di grassroot nama Achmady kalah populer jika dibandingkan dengan elit NU lainnya seperti K.H. Ali Maschan Moesa dan Saifullah Yusuf.

Tokoh NU kedua yang mencalonkan diri sebagai gubernur adalah Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah mantan Ketua Umum PP didua banom perempuan NU yakni IPPNU dan Fatayat dan saat *running* pilgub Khofifah masih tercatat sebagai Ketua Umum PP non-aktif Muslimat, selain itu beliau juga mantan Ketua Umum PC PMII Surabaya (sejarah perempuan pertama yang menjadi

* Alumni Program Sarjana S1 Departemen Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga

Ketua Umum). Khofifah menggandeng Mudjiono seorang Purnawirawan TNI AD dengan jabatan terakhir sebagai Kasdam V Brawijaya. Untuk memenangi pilgub kali ini, Khofifah mengandalkan Koalisi Nusantara Jatim Bangkit yang terdiri dari 12 parpol kecil diantaranya PPP, PDS, PKPI, PNBK, dan PBR dan juga ormas, organisasi bersifat ad hoc atau relawan, dan lainnya.

Keterlibatan Muslimat dalam dunia politik pertama kali ditandai dengan keterlibatan mereka pada pemilu 1955, pada saat itu terdapat lima kader Muslimat yang terpilih pada pemilihan parlemen nasional. Tapi sayang kegiatan ini harus berhenti pada saat pemerintahan Soeharto karena beliau menginginkan peran seorang perempuan hanya sebagai ibu dan istri yang tetap tinggal di rumah. Setelah pemerintahan Soeharto jatuh, Muslimat dan Fatayat mulai lagi mengembangkan sayap mereka ke dunia politik hal ini terbukti pada pemilu 2004 yang lalu Muslimat dan Fatayat ikut memperjuangkan diberlakukannya penambahan kuota untuk perwakilan perempuan di parlemen, karena menurut Ketua Fatayat Nasional, Maria Ulfha Anshor, lebih banyak perwakilan perempuan di parlemen maka akan membuat kondisi perempuan di Indonesia lebih baik¹.

Selain itu pernyataan tersebut juga merefleksikan adanya kebutuhan untuk meningkatkan perwakilan perempuan di parlemen dengan tujuan untuk membuat hukum yang lebih sensitif gender agar dapat mendorong kegiatan perempuan diluar parlemen untuk meningkatkan kondisi perempuan Indonesia secara keseluruhan. Selain kegiatan dalam kampanye pemilihan umum dan mendorong masyarakat untuk memilih perempuan, kedua badan otonom tersebut juga mendorong para anggotanya untuk menjadi kandidat anggota parlemen dari partai politik yang mereka inginkan. Oleh sebab itu bukan menjadi hal yang aneh lagi jika Muslimat dan Fatayat terjun ke dalam politik praktis.

Sosok Khofifah mulai dikenal ketika berpidato dalam Sidang Umum DPR-RI 1998 dimana dalam pidatonya tersebut Khofifah mengkritisi pemerintahan Orde Baru yang dianggapnya berjalan tidak demokratis. Selang beberapa waktu kemudian Khofifah ditunjuk oleh Presiden ke-4 RI yakni Aburrahman Wahid atau Gus Dur untuk menempati pos baru sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan, tapi sayang keberadaannya dalam kabinet Persatuan Indonesia bentukan Gus Dur itu tidak bertahan lama seiring

dengan jatuhnya pemerintahan Gus Dur yang kemudian digantikan oleh Megawati.

Pemilihan Khofifah sebagai cagub diumumkan oleh Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali di Surabaya pada hari kamis (27/3/08) usai menghadiri Rapat Anggota Tahunan Puskowan yang juga dihadiri Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPW PPP Jatim, Farid Al Fauzi, disebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan mendasar mengapa partai berlambang Ka'bah ini memilih Khofifah: *pertama*, Khofifah memiliki integritas kemasyarakatan yang tidak diragukan. *Kedua*, pengalaman memimpin menjadi modal penting untuk menjadikan Jawa Timur lebih baik (pernah menjadi menteri, wakil ketua komisi di DPR, dan sekarang juga masih tercatat sebagai anggota DPR). *Ketiga*, Khofifah merupakan tokoh perempuan yang diharapkan mempunyai nilai tambah. Dan yang *keempat*, Khofifah merupakan pimpinan organisasi perempuan terbesar di Indonesia yakni Muslimat NU dan juga pernah menjabat sebagai Pimpinan Pusat di dua organisasi perempuan yang lain yaitu Fatayat NU dan IPPNU dengan jumlah anggota Muslimat NU di Jawa Timur, baik yang memiliki KTA maupun tidak itu berjumlah sekitar 4 juta orang. Sedangkan anggota Fatayat NU diperkirakan sebanyak 2 juta anggota dari IPPNU sekitar 1 juta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis merumuskan dua permasalahan, yakni: Kepentingan apa yang melatar belakangi keterlibatan badan otonom perempuan Nahdlatul Ulama yakni: Muslimat, Fatayat dan IPPNU sebagai tim sukses Kaji Manteb untuk wilayah kabupaten Sidoarjo, dan Strategi pemenangan apa yang dilakukan oleh Muslimat, Fatayat dan IPPNU untuk mendulang suara di daerah Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif sebagai perangkat untuk melakukan analisis dan interpretasi data yang telah terkumpul, dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara dengan informan, selain itu untuk memperoleh data-data pelengkap penulis juga melakukan penelusuran melalui internet, jurnal, serta buku-buku yang relevan untuk keabsahan data dilakukan teknik triangulasi.

Kepentingan Muslimat, Fatayat dan IPPNU

Tiga badan otonom perempuan Nahdlatul Ulama yakni Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo baik di Cabang, anak Cabang dan ranting-ranting

¹ Jurnal karya Wahidah Zein br Siregar, *Responses of Muslimat and Fatayat to the Quota for Women in the 2004 Elections*, 2004.

di seluruh Jawa Timur all out mendukung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Mudjiono dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun lalu.

Jabatan sebagai gubernur dan wakil gubernur sangatlah penting dalam pemerintahan daerah karena semua kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak ditentukan oleh orang yang menduduki jabatan tersebut, dan tak bisa disangkal posisi ini mampu menyedot perhatian warga nadliyin terutama banom perempuan NU yang menginginkan kadernya menduduki posisi tersebut.

Secara psikologis, majunya Khofifah sebagai calon gubernur menjadi daya tarik tersendiri bagi banom perempuan NU (Muslimat, Fatayat, IPPNU) selain kesamaan keyakinan dan nilai yang dianut (sama-sama penganut Islam tradisional), Khofifah juga pernah menjadi pimpinan pusat diketiga banom tersebut bahkan saat mencalonkan diri menjadi gubernur Khofifah masih tercatat sebagai ketua non aktif Muslimat se-Indonesia.

Hubungan yang terjalin antara Khofifah dan banom perempuan NU menimbulkan ikatan emosional yang cukup kuat dan menciptakan loyalitas dan solidaritas tersendiri dikalangan warga nadliyin terutama kaum perempuan. Tentu saja hal ini menjadi modal yang sangat berharga ketika Khofifah mencalonkan diri menjadi gubernur Jawa Timur. Secara leksikal, solidaritas berarti gabungan atau kesepakatan dari seluruh elemen atau individu sebagai satu kelompok, kesatuan yang lengkap, seperti dari opini, tujuan, kepentingan, perasaan, dan sebagainya²

Dalam Ilmu Sosiologi modern, agama lebih banyak dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan integrasi daripada dengan hal-hal yang terkait dengan konflik. Emile Durkheim sebagai salah seorang Sosiolog abad ke-19, menemukan hakikat agama yang pada fungsinya sebagai sumber dan pembentuk solidaritas mekanis. Ia berpendapat bahwa agama adalah suatu pranata yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengikat individu menjadi satu-kesatuan melalui pembentukan sistem kepercayaan dan ritus. Melalui simbol-simbol yang sifatnya suci. Agama mengikat orang-orang kedalam berbagai kelompok masyarakat yang terikat satu kesamaan.

Ide tentang masyarakat adalah jiwa dari agama, demikian ungkap Emile Durkheim dalam *The Elementary Form of Religious Life* (1915). Berangkat dari kajiannya tentang paham

totemisme masyarakat primitif di Austria, Durkheim berkesimpulan bahwa bentuk-bentuk dasar agama meliputi: pemisahan antara 'yang suci' dan 'yang profane', permulaan cerita-cerita tentang dewa-dewa, dan macam-macam bentuk ritual

Menurut Durkheim, agama bukanlah "sesuatu yang di luar", tetapi "ada di dalam masyarakat" itu sendiri, agama terbatas hanya pada seruan kelompok untuk tujuan menjaga kelebihan-kelebihan khusus kelompok tersebut. Oleh karena itu, agama dengan syariatnya tidak mungkin berhubungan dengan seluruh manusia. Durkheim membedakan dua jenis solidaritas: *solidaritas mekanis* dan *solidaritas organis*. Satu hal yang pasti bagi Durkheim, solidaritas terkait dengan realitas sosial. Solidaritas muncul dalam ranah sosial, hubungan antar-individu manusia.

Solidaritas mekanis datang dari kultur atau kondisi homogen, biasanya didasari atas kesamaan agama, kesamaan profesi, kedaerahan, gaya hidup, dan sejenisnya. Ikatan yang terjadi bukan karena adanya paksaan dari luar atau karena intensif ekonomi semata, melainkan dikarenakan adanya kesadaran bersama yang didasarkan pada kepercayaan yang sama dan nilai-nilai yang disepakati sebagai standar moral dan pedoman tingkah laku. Dengan solidaritas mekanis, masyarakat yang hidup berdasarkan sistem kekeluargaan dan kekerabatan serta kegotong-royongan dapat bertahan dengan asas keharmonisan.

Sementara *solidaritas organik* bersifat interdependen, yang muncul oleh sebab khusus, dan terkait dengan "kohesi moral" alias sebab-sebab yang lebih abstrak. Suatu solidaritas baru yang didasarkan pada kesadaran terhadap kondisi pluralitas yang terbentuk apabila dalam masyarakat yang telah mengalami proses individualisasi itu telah timbul kesadaran adanya saling ketergantungan di antara mereka dan timbul pula rasa saling membutuhkan. Dalam masyarakat modern yang cirinya adalah diferensiasi fungsional yang tinggi dan pembagian kerja yang rumit, maka keharmonisan yang sederhana mulai terancam dan potensi konflik mulai membesar.

Solidaritas inilah yang menjadi penyangga utama Nahdlatul Ulama beserta banom-banomnya, solidaritas di lingkungan NU biasa disebut dengan *Ukhuwah Islamiyah*. Menurut arti bahasa dalam masalah ijtima'iyah, *ukhuwah* dapat dijabarkan dalam beberapa konteks hubungan sebagai berikut:

1. Persaudaraan sesama muslim (*Ukhuwah*

² Websters New World Dictionary, 1998

Islamiyah) yang tumbuh dan berkembang karena persamaan aqidah atau keimanan baik tingkat nasional maupun internasional.

2. Persatuan nasional, yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Solidaritas kemanusiaan, yang tumbuh dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersidat universal.

Dalam pengertian luas, *ukhuwah islamiyah* memberikan cakupan arti suatu sikap yang mencerminkan rasa persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain atau suatu kelompok pada kelompok lain dalam interaksi sosial. Timbulnya sikap *ukhuwah islamiyah* dalam kehidupan masyarakat disebabkan adanya dua hal, yaitu: 1) Adanya persamaan, baik dalam masalah keyakinan atau agama, wawasan, pengalaman, kepentingan, tempat tinggal maupun cita-cita. 2) Adanya kebutuhan yang dirasakan hanya dapat dicapai dengan melalui kerjasama dan gotong royong serta persatuan. Salah satu penerapan konsep dan wawasan *ukhuwah*, adalah persaudaraan Islam (*ukhuwah islamiyah*) seyogyanya dimulai dari lingkungan yang paling kecil (keluarga), kelompok atau warga suatu jam'iyah kemudian dikembangkan dalam lingkungan yang lebih luas (antar jam'iyah, aliran dan bangsa).

Para sosiolog berpendapat bahwa para aktor mengambil keputusan dan beraksi berdasarkan sistem nilai dan keyakinan (beliefs) yang mereka pegang. Sistem nilai dan kepercayaan diyakini menuntun setiap individu untuk mengambil keputusan, kedua hal tersebut memiliki kekuatan lebih untuk mengarahkan keputusan seperti apa yang akan diambil dibandingkan dengan logika dan perhitungan kalkulatif³.

Sistem nilai dan kepercayaan yang muncul dalam permasalahan ini berupa aliran Islam tradisional, di Indonesia para penganut Islam tradisional memiliki wadah organisasi keagamaan yang bernama Nahdlatul Ulama dan menjadi salah satu organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Ruth McVey memberikan gambaran yang jelas mengenai "aliran" dalam konteks di masyarakat Indonesia:

"Seen from one political angle, the aliran divisions apply to an ongoing ideological argument in national politics...essentially a debate among

factions of the Jakarta elite. From another, they refer to the political expression of vertical cleavages in the wider Indonesian society, based on cultural variation. Finally, they apply as well to horizontal social divisions reflecting class differences. Sometimes these aspects connect with and reinforce each other, but they do not necessarily do so; and hence the aliran change their scope and quality according to the context in which they are being discussed."⁴

Vertical cleavages based on cultural variation, dalam konteks ini dapat diartikan sebagai perbedaan budaya Islam yang ada di masyarakat Indonesia. Perbedaan budaya Islam yang dimaksud adalah perbedaan tata cara ibadah keagamaan, Islam tradisional mempertahankan tata cara peribadatan Islam dengan membangun kubur, berziarah, doa lewat perantara dan tarekat. Di kalangan masyarakat Islam Indonesia tata cara peribadatan ini telah menuai kontroversi dari berbagai kalangan dan kalangan yang paling keras menentang tata cara seperti ini adalah kalangan Islam pembaharu yang di wakili oleh Muhammadiyah. Perselisihan yang berlarut-larut ini ikut mempengaruhi preverensi politik masyarakat Islam Indonesia, baik yang tergabung dalam Muhammadiyah maupun NU.

Nahdlatul Ulama sebagai organisasi massa terbesar di Indonesia tentu mempunyai kekuatan yang potensial untuk dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah, hal ini tercermin dari tindakan NU dalam politik praktis ketika mereka memutuskan untuk keluar dari Masyumi dan kemudian membentuk partai sendiri dengan nama Partai NU yang dinyatakan dalam Mukhtar NU ke-19 di Palembang pada tahun 1952. Sayangnya, Partai NU hanya dapat bertahan selama sebelas tahun karena Soeharto sebagai penguasa Orde Baru tidak menghendaki banyak partai dalam percaturan politik Indonesia, maka dibuatlah kebijakan baru dengan menyederhanakan jumlah partai yang ada berdasar pada kelompok keagamaan, nasionalis dan karya.

Dibawah kepemimpinan Soeharto, NU yang pada awalnya adalah sebuah partai politik; bersama-sama dengan Parmusi, PSII dan Perti berfusi kedalam sebuah partai baru yang diberi nama Partai Persatuan Pembangunan atau yang biasa disebut PPP. Kerjasama diantara keduanya tidak dapat berjalan dengan mulus karena warga

³ Firmanzah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, halaman 110.

⁴ Afan Gaffar, *Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1992, halaman 188.

NU merasa dipinggirkan dan diminimalisasi peranannya dalam partai tersebut, hal inilah yang kemudian mendorong NU untuk kembali ke Khittah 1926.

Jatuhnya Soeharto dari tampuk kepemimpinan berimbas pada kebebasan untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, ide dan gagasan yang selama ini diatur secara ketat oleh pemerintah. NU dengan massa kurang lebih 40 juta orang atau sekitar seperlima dari total penduduk Indonesia juga tidak sabar untuk menyalurkan aspirasi politiknya ke suatu wadah politik yang bernilai ke-NU-an dan akhirnya pada 23 Juli 1998 lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa yang mengklaim menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi politik warga nadliyin.

PKB yang mengklaim dirinya sebagai partai warga nadliyin melakukan blunder dengan mengusung calon pasangan yang bisa dikatakan kurang tepat, beberapa massa PKB yang rata-rata di dominasi oleh warga nadliyin menyatakan kekecewaannya terhadap calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang di usung oleh partai tersebut, pasangan Achmady-Suhartono dianggap kurang mampu mewakili aspirasi warga NU selain karena sosoknya yang kurang dikenal di mata warga nadliyin, warga nadliyin juga meragukan kepeduliannya terhadap NU.

Banyaknya kader NU yang ikut meramaikan bursa pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur menimbulkan polemik tersendiri dikalangan grass root, suara warga nadliyin yang mencapai 70 % dari masyarakat Jawa Timur tidak dapat dioptimalkan karena suara mereka telah terpecah belah. Hal ini pun juga berdampak pada dukungan Muslimat, Fatayat dan IPPNU Cabang Sidoarjo dalam mendukung pasangan Khofifah dan Mudjiono, banyaknya kader NU yang meramaikan pilgub ikut memecah dukungan tiga banom perempuan NU Cabang Sidoarjo.

Banyaknya kader NU yang meramaikan *running* pilgub tahun 2008 ikut mempengaruhi keharmonisan hubungan diantara anggota banom perempuan NU, terutama di kalangan anggota Muslimat Cabang Sidoarjo. Meskipun sebagian besar anggota Muslimat mendukung pencalonan Khofifah, ada sebagian kecil dari mereka yang mendukung Ali Machesan Moesa, Gus Ipul dan Achmady tetapi memang diantara pendukung ketiga kader NU tersebut gesekan hanya muncul diantara pendukung Khofifah dan pendukung Achmady. Gesekan ini tak terelakkan karena pendukung Achmady mengatasnamakan dukungannya dengan membawa nama Muslimat Anak Cabang Tanggulangin dalam setiap kegiatan

sosialisasinya, padahal hal ini tidak boleh dilakukan mengingat Muslimat adalah organisasi kemasyarakatan yang fokus pada penguatan civil society.

Contoh sebagian kecil pendukung Achmady-Suhartono di internal Muslimat adalah Ketua Muslimat Anak Cabang Tanggulangin dan Krian, sejak awal tidak mendukung pencalonan Khofifah mereka lebih memilih untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan menjadi tim sukses pasangan Achmady-Suhartono yang diusung oleh PKB. Dari penuturan bu Ainun ketahu bahwa Ketua Muslimat Anak Cabang Tanggulangin dan Krian merupakan anggota Partai Kebangkitan Bangsa meskipun mereka tidak menjadi pengurus partai tetapi setiap PKB mencalonkan kadernya dalam suatu pemilihan, mereka selalu turut serta membantu kampanye politik. Mengingat posisi mereka sebagai Ketua Anak Cabang Muslimat di tingkat Kecamatan yang memang cukup strategis dan disegani di lingkungan warga nadliyin.

Fanatisme terhadap partai politik, yakni Partai Kebangkitan Bangsa yang sejak awal pendiriannya mengklaim sebagai partai politik 'resmi' warga nadliyin ikut mempengaruhi preferensi politik Ketua Muslimat Anak Cabang Tanggulangin dan Krian. Selain fanatisme terhadap parpol, keberadaan Gus Dur sebagai salah satu tokoh yang disegani dikalangan warga nadliyin sekaligus salah satu pendiri PKB juga sangat menentukan, restu yang diberikan oleh Gus Dur kepada Achmady mampu menggerakkan warga nadliyin untuk mendukung beliau terlepas dari kontribusi yang sudah diberikan beliau untuk Nahdlatul Ulama dan PKB.

Perpecahan di Muslimat akibat banyaknya kader NU yang maju dalam *running* pilgub juga terjadi di Fatayat, namun perpecahan tersebut tidak sampai menimbulkan gesekan yang berarti di internal Fatayat. Sedangkan di IPPNU hampir tidak ada gesekan, karena memang dalam proses sosialisasinya hanya melibatkan empat orang anggota IPPNU cabang Sidoarjo.

Selain faktor ideologi dan solidaritas, Salisbury juga mengatakan adanya faktor ekonomi yang ikut menentukan keputusan seseorang untuk ikut bergabung dalam sebuah kelompok, dan tidak menutup kemungkinan faktor ini juga dimiliki oleh ketiga banom perempuan NU dengan bergabungnya mereka menjadi tim sukses Kaji Manteb meskipun faktor ini tidak terlalu menonjol. Meskipun faktor ini tidak terlalu menonjol tetapi secara tidak langsung faktor ini ikut mempengaruhi keterlibatan mereka dalam aksi dukung mendukung dalam setiap pemilu, misalnya pada saat Fatayat ikut

membantu kemenangan pasangan *incumbent* bupati dan wakil bupati Sidoarjo H Drs Win Hendrarso-H Saiful Ilah SH dalam pilkada Sidoarjo tahun 2005, pak Win dan pak Saiful mengibahkan sebuah mobil kijang kepada Fatayat untuk kegiatan operasional sehari-hari dan memberikan bantuan dana untuk kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Fatayat. Selain itu beberapa saat sebelum pilgub berlangsung Khofifah juga mengibahkan sebuah mobil Suzuki APV kepada setiap Cabang Muslimat di seluruh kabupaten Jawa Timur.

Strategi Pemenangan Pemilu

Memenangkan pertarungan dalam suatu pemilu tidak hanya mengandalkan jargon tetapi juga dibutuhkan orang-orang yang mau berpartisipasi mendukung peserta pemilu sekaligus mengajak masyarakat luas untuk ikut memenangkan peserta yang didukungnya, orang-orang ini biasa dikenal dengan sebutan tim sukses. Dan pasangan Khofifah-Mudjiono dalam pilgub kali ini didukung oleh 12 Koalisi partai kecil yang terdiri dari PPP, PDS, PKPI, PNBK, dan PBR yang dikenal dengan nama Koalisi Nusantara Jatim Bangkit. Selain tim sukses dari koalisi ke-12 parpol tersebut, Khofifah juga menggerakkan massa pendukungnya di tiga banom perempuan NU yakni, Muslimat, Fatayat dan IPPNU untuk ikut memenangkan dirinya sebagai gubernur pertama dari kalangan NU.

Dimasing-masing banom Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo membentuk tim sukses ditingkat Cabang (kabupaten); untuk Muslimat dan Fatayat, tim sukses yang ada di kabupaten selanjutnya menyerahkan penyelenggaraanya kepada pengurus yang berada di tingkat anak Cabang untuk diteruskan ke ranting-ranting. Sedangkan untuk IPPNU setelah di bentuk tim pemenangan di tingkat kabupaten mereka menunjuk koordinator di tiap-tiap kecamatan untuk kemudian diteruskan ke koordinator bidang masing-masing.

Pemilihan para anggota tim sukses, ketiga banom memiliki cara yang berbeda-beda. Muslimat Cabang Sidoarjo melakukan proses penyeleksian berdasarkan pada sosok individu anggotanya yang dianggap berpengaruh di Sidoarjo, loyal pada organisasi, dan mengenal betul peta kekuatan Muslimat di Sidoarjo. Cara yang dilakukan oleh

Fatayat Cabang Sidoarjo sedikit berbeda dengan yang di lakukan oleh Muslimat, sama-sama melalui proses penyeleksian tetapi proses ini hanya dilakukan oleh tim formatur yang sudah mewakili pengurus harian Fatayat Cabang Sidoarjo dan terdiri atas Ketua Fatayat, Ketua Fatayat terpilih, Pembina Fatayat dan wakil dari empat karisedenan di Sidoarjo. Ketujuh orang inilah yang menentukan siapa saja yang dianggap mampu untuk mengemban tugas ini. Berikut ini adalah susunan tim sukses yang berasal dari banom Muslimat NU dan Fatayat NU Cab. Sidoarjo:

Jabatan Muslimat NU Cab. Sidoarjo
Fatayat NU Cab. Sidoarjo

Jabatan	Fatayat NU	Muslimat NU
Ketua I	Dra. Ma'rufah	Hj. Farida Wahab
Ketua II	Dra. Hj. Mahmudah	Hj. Sulaichayah
Sekretaris I	Dra. Hj. l'anatus Solichah	Dra. Hj. Ainun Jariyah
Sekretaris II	Hj. Lilik	Dra. Hj. Nur
Bendahara I	Azkiyah	Lutfiyah
Bendahara II	Nur Ilmiyah, SE	Hj. Wiwik
	Hj. Mutmainah	Hidayah, S.pd
		Hj. Choriyah

Proses penyeleksian tim sukses di IPPNU (biasanya disebut TS atau Tim Sukarelawan) berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Muslimat dan Fatayat. Banom ini menunjuk empat anggota IPPNU Cabang sidoarjo yang dianggap loyal dan mengenal daerah Sidoarjo dengan baik untuk dijadikan TS; keempat TS tersebut memiliki desk job yang berbeda; satu orang melakukan koordinasi dengan IPPNU di wilayah, yang lainnya melakukan koordinasi dengan Muslimat, Fatayat dan TS-TS di desa-desa; dan semua yang dilakukan oleh TS-TS tersebut atas sepengetahuan Ketua IPPNU Sidoarjo.

Sebagai organisasi sosial yang bersifat keagamaan Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo memiliki posisi yang sangat strategis, jaringan yang dimiliki sangat luas mulai wilayah provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kampanye politik karena para peserta pemilu harus bisa menyentuh (*cover*) seluruh lapisan masyarakat, selain itu keunggulan ketiga banom NU tersebut yakni mengenal betul bagaimana karakteristik konstituennya yang dapat memudahkan mereka untuk menyampaikan kebijakan yang diambil oleh

⁵ *Tahlilan*, biasa dilakukan pada saat seseorang meninggal dunia. Keluarga yang ditinggal biasanya mengadakan tahlilan selama tujuh hari setelah kematian salah seorang anggota keluarganya dan diadakan lagi ketika telah memasuki hari ke-40 dan ke 100. pada acara ini dibacakan ayat-ayat al-Qur'an dan doa-doa untuk mendoakan almarhum.

⁶ Meskipun bu Asiyah berdomisili di Kecamatan Krembung, bu Asiyah sering memberikan ceramah keagamaan di Tanggulangin dan termasuk tokoh yang disegani di kalangan warga nadliyin perempuan.

banom tersebut.

Dalam rangka untuk mensukseskan kemenangan pasangan Khofifah-Mudjiono, dalam proses sosialisasinya; Muslimat dan Fatayat masuk melalui kegiatan rutin banom seperti jam'iyah, istiqosah⁵, tahlil⁶ dan yasinan yang diadakan seminggu sekali di tingkat ranting. Baik Muslimat maupun Fatayat tidak menambah frekuensi kegiatan rutin mereka ketika menjelang maupun sesudah pilgub; jam'iyah, istiqhosah, tahlil dan yasinan tetap dilakukan seminggu sekali.

Kegiatan-kegiatan seperti ini memang jamak digunakan sebagai saluran komunikasi politik dengan memanfaatkan karakter kegiatan tersebut sebagai tempat pertemuan spiritual, selain lebih spiritual pertemuan tersebut juga cenderung informal sehingga dapat mempermudah proses penyampaian pesan-pesan politik. Sebagai kegiatan yang berakar dari tradisi pesantren yang sangat kuat tentu dalam setiap penyelenggaraan kegiatan ini juga mengandung kedekatan emosional diantara warga nadliyin.

Proses sosialisasi yang dilakukan oleh TS dari IPPNU berbeda jauh dengan yang dilakukan oleh Muslimat dan Fatayat, IPPNU; karena keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh anggota TS (semuanya perempuan) dibantu dengan IPNU mensosialisasikan KaJi secara informal dalam artian mereka lebih banyak berbaur dengan masyarakat luas. Misalnya lewat acara ngopi-ngopi di warung pinggir jalan dll.

Strategi untuk memenangkan pilgub di daerah Sidoarjo diserahkan seluruhnya oleh tim sukses pusat kepada banom perempuan NU, mengingat ini bukanlah dukungan pertama yang diberikan banom perempuan NU untuk kandidat pasangan kepala daerah. Kegiatan kampanye politik serupa juga dilakukan oleh anggota Muslimat Anak Cabang Tanggulangin yang mendukung Achmady, hanya saja mereka menambah frekuensi kegiatan diluar acara rutin banom untuk mensosialisasikan visi dan misi pasangan Achmady-Suhartono. Mereka juga mengajak tokoh agama yang disegani di Kecamatan Tanggulangin yakni bu Siti Asiyah⁷ atau yang biasa dipanggil Nyi Asiyah. Muslimat dan Fatayat pendukung KaJi Manteb berkomitmen untuk saling bahu membahu memenangkan pilgub periode 2008-2013, namun keduanya tak lepas dari konflik.

Konflik yang terjadi muncul karena

kekecewaan Muslimat terhadap Fatayat karena anggota Fatayat tidak sepenuhnya mendukung Khofifah dalam pilgub. Pada kampanye putaran pertama Muslimat dan Fatayat menghadapi kendala ketika disebarkannya isu atau rumor mengenai ketidaksetujuan para kyai khos⁸ mengenai pencalonan Khofifah maju sebagai gubernur, banyak kalangan NU yang mengeluarkan pendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin. Dengan mengutip Al-Qur'an atau hadits nabi, seorang perempuan memang diharamkan untuk diangkat menjadi pemimpin. Namun jika kita berkaca dari peristiwa lima tahun yang lalu ketika Ketua Umum NU KH Hayim Muzadi menerima pinangan Megawati sebagai Wakil Presiden hal ini juga menjadi polemik bagi warga nadliyin, bukan saja karena kenekatan Hasyim Muzadi terjun kepolitik praktis tetapi juga karena disebabkan diterimanya pinangan dari Megawati yang seorang perempuan. Untuk mengakhiri polemik tersebut diadakanlah Musyawarah Alim Ulama di Pasuruan yang kemudian memutuskan bahwa perempuan diperbolehkan menjadi seorang pemimpin. Kejadian inilah yang menjadi rujukan bagi Muslimat dan Fatayat untuk meng-*counter* isu-isu yang sudah tersebar.

Persetujuan dari Kiai Khos memang cukup penting bagi pasangan Khofifah-Mudjiono, selain karena kedudukannya yang strategis, kiai khos juga merupakan kelas penentu dan komunikator tertinggi yang pesan-pesannya tidak bisa dibantah oleh kiai pada umumnya apalagi oleh warga biasa. Selain beredarnya isu mengenai ketidaksetujuan Kiai Khos, juga beredar kabar mengenai keberadaan orang-orang nasrani yang mendukung Khofifah-Mudjiono. Sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai ras, suku, agama dan kebudayaan, kita tidak dapat menutup mata mengenai keberadaan orang-orang yang memeluk agama katolik dan protestan. Dukungan yang mereka berikan kepada Khofifah-Mudjiono dapat berarti banyak dan tidak bisa disepelekan, namun hal ini cukup merepotkan bagi Muslimat dan Fatayat karena sebagean besar konstituen mereka adalah kalangan masyarakat yang fanatik dan pengalaman serta pengetahuan politiknya kurang dan tentu saja isu-isu yang dimunculkan berpotensi menggerus perolehan suara mereka.

Aksi pengembosan yang dilakukan oleh PKB melalui PPKB (Pergerakan Perempuan

⁷ Meskipun bu Asiyah berdomisili di Kecamatan Krembung, bu Asiyah sering memberikan ceramah keagamaan di Tanggulangin dan termasuk tokoh yang disegani di kalangan warga nadliyin perempuan.

⁸ Kiai khos adalah kiai-nya kiai

Kebangkitan Bangsa) memberikan kekhawatiran tersendiri bagi Muslimat dan Fatayat, karena pada pemilu 2004 yang lalu hampir semua warga nadliyin di Sidoarjo menyalurkan aspirasi politiknya melalui PKB⁹. Meskipun partai yang mengusung Khofifah –Mudjiono (PPP) juga memiliki sejarah tersendiri dengan NU, keyakinan masyarakat bahwa PKB adalah satu-satunya saluran politik yang “sah” bagi warga nadliyin tidak dapat diubah dalam waktu sekejap.

Muslimat dan Fatayat berusaha menakutkan para konstituennya bahwa memilih pemimpin (calon gubernur) yang memiliki latar belakang NU merupakan pilihan yang paling tepat untuk saat ini selain karena sosok Khofifah yang dianggap capable untuk jabatan ini juga untuk mensejahterahkan warga nadliyin, karena siapa lagi yang bisa memahami permasalahan mereka semua jika bukan orang NU sendiri.

Untuk menakutkan konstituennya agar memilih pemimpin yang berlatar belakang NU, Muslimat dan Fatayat mendapat dukungan dari kiai, ulama dan tokoh masyarakat sekitar yang tergabung dalam banom mereka yang juga ikut mendukung Khofifah maju sebagai gubernur, misalnya saja di daerah Krembung; disini kita akan melihat betapa krusialnya peran ulama dan tokoh masyarakat lokal dalam menentukan preferensi politik masyarakat sekitar. Pada putaran pertama Khofifah menguasai perolehan suara di kecamatan ini tetapi Khofifah gagal mengulangi kesuksesannya di putaran kedua. Berdasarkan penuturan Ainun, kegagalan KaJi Manteb mengulangi kesuksesan di putaran kedua lebih disebabkan karena ketidakberpihakan tokoh ulama perempuan yang dihormati di daerah tersebut yakni bu Asiyah (dikenal dengan nama Nyi Asiyah) kepada KaJi.

Keenganan Asiyah untuk mendukung Khofifah-Mudjiono ditengarai oleh banyak pihak karena putra beliau adalah kader dari Partai Demokrat dan mencalonkan diri pada pemilihan calon legislatif untuk Kabupaten Sidoarjo pada pemilu 2009 yang lalu. Dua putra putri Asiyah memang mencalonkan diri dari dua partai yang berbeda, putri beliau mencalonkan diri dari

Partai Kebangkitan Bangsa sedangkan putranya mencalonkan diri melalui Partai Demokrat.

Sebutan Gus, ulama¹⁰ dan kiai¹¹ atau nyai untuk perempuan memang lebih dikenal di kalangan masyarakat Sidoarjo, Zamakhsyari Dhofier mencatat ada tiga sebutan kiai yang berbeda-beda artinya: *pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat misalnya Kiai Slamet untuk sebutan seekor kerbau yang ada di Keraton Solo; *kedua*, sebagai gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya; *ketiga*, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang dimiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya.

Sebagai penganut ajaran Ahlussunnah Wal-jamaah, NU menganut paham keulamaan, ulama dianggap sebagai penerus Nabi Muhammad dalam menyebarkan ajaran Islam oleh karena itu, ulama atau kiai memainkan peran sosial yang strategis di kalangan warga nadliyin, karena kemampuannya dalam menerjemahkan bahasa politik ke dalam bahasa agama yang mudah dipahami dan diterima oleh jamaa'ahnya dan juga sekaligus sebagai sumber informasi utama dalam pengambilan keputusan politik untuk berpartisipasi dalam suatu proses politik.

Simpulan

Kepentingan yang melatar belakangi keterlibatan Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2008 dengan menjadi tim sukses pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono adalah: Kedudukan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur menjadi incaran banyak orang, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar di Indonesia yang memiliki basis massa cukup banyak di Jawa Timur tentu kepentingan untuk menduduki posisi tersebut. Hal ini tercermin dari banyaknya kader NU yang maju dalam *running* pilgub, Khofifah sebagai satu-satunya kandidat perempuan mendapat dukungan penuh dari banom perempuan NU yakni; Muslimat, Fatayat dan IPPNU.

⁹ Perolehan suara PKB di Sidoarjo pada pemilu 2004 lihat lampiran.

¹⁰ Menurut Hiroko Horikoshi, ulama termasuk kedalam model kepemimpinan “administratif”, yakni kepemimpinan yang diperoleh seseorang karena posisi yang diperankannya dalam suatu struktur administrasi tertentu.

¹¹ Menurut Hiroko Horikoshi, kiai termasuk dalam model kepemimpinan simbolik. Dimana dalam model ini mengasumsikan bahwa seseorang menjadi pemimpin karena ia menjadi simbol dari sesuatu yang dianggapnya adiluhung atau merupakan symbol dari konsep metafisika tertentu. Dalam masyarakat tradisional, kiai merupakan wakil atau symbol kehadiran Nabi di muka bumi, kiai adalah pewaris tradisi para Nabi (waratsat al-nabiya), sehingga ajaran yang dibawanya pun adalah ajaran para Nabi.

Solidaritas, atau dalam NU biasa dikenal dengan sebutan *ukhuwah islamiyah* merupakan salah satu faktor yang mendorong Muslimat, Fatayat dan IPPNU Sidoarjo ikut terlibat dalam *running* pilgub tahun 2008 dengan menjadi tim sukses pasangan Khofifah-Mudjiono, persamaan nilai-nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh ketiga banom perempuan NU dengan Khofifah membuat mereka yakin akan kemampuan sang calon gubernur, tentu tanpa menghilangkan *track record* yang telah ditorehkan oleh Khofifah. Kebersamaan yang telah terjalin cukup lama membuat ketiga banom perempuan NU merasa lebih mengenal sosok Khofifah yang sebenarnya; mengetahui kepedulian, perjuangan dan loyalitas Khofifah kepada NU khususnya kepada banom perempuan NU. Kepedulian, perjuangan dan loyalitas Khofifah dibalas dengan hal yang setimpal oleh anggota banom dengan menjadi ujung tombak dalam kampanye politik Khofifah yang mencalonkan diri sebagai gubernur perempuan pertama di Jawa Timur.

Faktor ekonomi yang sangat mengedepan dalam setiap penyelenggaraan pemilu akhir-akhir ini tidak mempengaruhi preferensi politik banom perempuan NU, karena mereka sadar Khofifah tidak akan melupakan begitu saja perjuangan dan loyalitas yang sudah ditunjukkan oleh mereka. Hal ini pun sudah dibuktikan Khofifah dengan tetap memberikan support baik dari segi materiil dan immateriil kepada banom perempuan NU Surabaya dan Sidoarjo yang telah ikut mengantarkan Khofifah duduk di Senayan. Hal ini memang harus dilakukan oleh Khofifah agar *networking* yang sudah terjalin tetap solid dan dapat dipergunakan lagi jika Khofifah ingin naik “pangkat” dengan maju sebagai presiden RI.

Era demokrasi saat ini memberikan jaminan kebebasan kepada seluruh warga Negara Indonesia untuk mengemukakan pendapat; ide dan gagasan yang mereka miliki, gesekan bahkan konflik yang timbul akibat perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang sering dilakukan oleh masyarakat. Majunya empat kader NU dalam bursa pencalonan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 menimbulkan gesekan di internal banom perempuan NU terutama Muslimat, hubungan harmonis diantara anggotanya ternoda oleh kepentingan sekelompok individu yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Perpecahan di internal banom tidak dapat dihindari mana kala sebagian besar anggota Muslimat mendukung Khofifah dan sebagian kecil lainnya memberikan dukungan kepada tiga kader NU yang lain.

Strategi yang digunakan oleh Muslimat, Fatayat dan IPPNU dalam menyakinkan konstituennya untuk memilih pasangan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono adalah diawali oleh Muslimat dan Fatayat dengan memilih badan pengurus harian beserta seksi-seksi nya disetiap banom. Kriteria umum yang dibutuhkan untuk menjadi tim sukses adalah royal kepada organisasi, dianggap berpengaruh di masyarakat dan kenal betul karakteristik konstituennya, sedangkan IPPNU hanya ‘menerjukkan’ empat orang untuk melakukan sosialisasi di masyarakat.

Selama kegiatan kampanye politik berlangsung, banom perempuan NU mensosialisasikan pasangan Kaji Manteb melalui kegiatan rutin banom yakni; *istiqosah*, *tahlil* dan *yasinan*. Dukungan dari para *influencer* yakni kiai dan ulama juga sangat berperan untuk mempengaruhi preferensi politik konstituen. Strategi yang digunakan banom perempuan NU untuk memenangkan pilgub di Sidoarjo seluruhnya dipercayakan oleh tim sukses pusat kepada banom, hal ini dilakukan karena banom mengenal betul bagaimana karakteristik konstituennya. Selain itu strategi yang digunakan dalam pilgub juga jamak dilakukan oleh banom untuk memenangkan kandidat pemimpin yang didukungnya. Hal serupa juga dilakukan oleh anggota Muslimat pendukung Achmady namun mereka menambah frekuensi kegiatan diluar acara rutin banom mengingat figure Achmady kurang begitu dikenal kalangan *grassroot*.

Keberadaan Kiai dan ulama selama proses kampanye politik yang dilakukan oleh Muslimat, Fatayat dan IPPNU memiliki peranan yang cukup krusial. Kultur warga nadliyin yang sangat menghormati kiai dan ulama membuat mereka memiliki posisi yang cukup tinggi dalam strata sosial masyarakat. Kiai dan ulama yang dipercayai mampu memberikan petunjuk, bimbingan dan pembinaan dalam memahami, mengamalkan dan mengembangkan ajaran Islam; juga diberikan kepercayaan untuk memberikan bimbingan dalam urusan duniawi termasuk dalam hal politik.

Preferensi politik para kiai dan ulama sangat mempengaruhi preferensi politik konstituennya. Bahkan dalam dunia politik terbentuk konstruksi politik yang diyakini benar adanya, misalnya beberapa calon wakil rakyat yang ingin maju dalam sebuah pemilihan umum baik itu untuk pencalonan di pemerintahan daerah ataupun pusat, dan calon pemimpin yang maju sebagai calon kepala pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten selalu sowan kepada beberapa ulama yang dianggap memiliki pengaruh besar di masyarakat begitu

mereka mendapat restu mereka akan mengumumkan kepada masyarakat luas dukungan dari ulama tersebut, tetapi jika hal yang sebaliknya terjadi hal ini bisa dijadikan semacam senjata bagi pesaing politiknya untuk menggembosi perolehan suara pesaingnya.

Keberhasilan yang telah dicapai oleh pasangan Khofifah-Mudjiono secara individual mempermudah kerja Muslimat, Fatayat dan IPPNU dalam menyakinkan konstituennya untuk memilih pasangan dengan no urut satu ini. Kesuksesan yang telah diraih dapat dijadikan referensi dalam menentukan siapa yang berhak untuk memimpin Jawa Timur di masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Asfar, Muhammad. 2005. *Esai-Esai Seputar PEMILU 2004*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Asfar, Muhammad. 2006. *Mendesain Manajemen Pilkada*. Surabaya: Pustaka Eureka
- Asmawi. 1999. *PKB: Jendela Politik Gus Dur*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press
- Asyari, Suaidi. 2009. *Nalar Politik: NU dan Muhammadiyah Over Crossing Java Sentris*. Yogyakarta: LkiS
- Firmanzah. 2007. *Marketing Politik: Antara Pemahaman dan Realitas*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Gaffar, Afan. 1992. *Javanese Voters : A Case Study of Election Under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Marijan, Kacung. 1992. *Quo Vadis NU : Setelah Kembali Ke Khittah 1926*. Penerbit Erlangga
- Mas'ood, Mochtar dan Colin MacAndrews. 2006. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhtadi, Asep Saeful. 2004. *Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran politik Radikal dan Akomodatif*. Jakarta: LP3ES
- Ornstein, Norman J and Shirley Elder. 1978. *Interest groups, Lobbying dan Policymaking*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Petracca, Mark P. 1992. *The Politics of Interest: Interest Group Transformed*. Colorado: Westview Press
- Sanit, Arbi. Swadaya. 1985. *Politik Masyarakat: Telaah Tentang Keterkaitan Organisasi Masyarakat, Partisipasi Politik, Pertumbuhan Hukum, dan Hak Asasi*. Jakarta: CV Rajawali
- Schröder, Peter. 2003. *Strategi Politik*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung

Jurnal

Siregar, Wahidah Zein Br. *Responses of Muslimat and Fatayat to the Quota for Women in the 2004 Elections*

Skripsi

Sudhiar, Wida Irvany. *Dinamika Politik Kepentingan Lesbian: Studi Tentang Perempuan Lesbian dalam Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi*. FISIP: Ilmu Politik